



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2019-2023**



**“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2019-2023, sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan turunan atau penjabaran dari RPJMD juga harus direview.

Mengusung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yaitu **Sumsel Maju untuk Semua** dan Misi ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif, maka BPSDMD merupakan lembaga hulu dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu mewujudkan sumber daya aparatur yang

kompeten dan mewujudkan pengelolaan kelembagaan diklat yang sesuai dengan standar yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2019-2023.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini, semoga rencana strategis dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan kegiatan, sehingga terjadi harmonisasi dan keterpaduan langkah dalam mewujudkan aparatur yang berkompeten.

Palembang, Januari 2022  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Sumsel,



Hj. TAREYAH, S.Pd., M.M  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 196410131984062001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	6
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah .....	16
2.2.1 Data Susunan Kepegawaian .....	16
2.2.2 Aset yang Dikelola .....	17
2.2.3 Unit Usaha .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	29
3.2.1 Visi .....	29
3.2.2 Misi .....	30
3.2.3 Tujuan dan Sasaran .....	31
3.2.4 Program Kepala Daerah .....	33

3.3 Telaahan Rencana Strategis BPSDM Kementerian	
Dalam Negeri .....	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
Hidup Strategis .....	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	40
4.1 Tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Provinsi Sumatera Selatan .....	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	46
5.1 Strategi .....	46
5.2 Arah Kebijakan .....	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN .....	51
6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2019-2020 .....	51
6.2 Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022 .....	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	91
BAB VIII PENUTUP .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.....	40
Gambar 4.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.....	41

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..	16
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan .....	17
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur .....	17
Tabel 2.5	Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional .....	17
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan .....	18
Tabel 2.7	Jumlah dan jenis diklat dalam 5 tahun terakhir.....	20
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan .....	21
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	24
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah .....	29
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan BPSDMD Prov. Sumsel berdasarkan Tujuan Renstra BPSDM Kemendagri RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	36
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi III RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 .....	46
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPSDMD Prov. Sumsel .....	49
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020 .....	60
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023 .....	60

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu  
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... 92



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu proses perencanaan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen perencanaan yang perlu dibuat sebagai pedoman pemerintah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan yang dibuat oleh Perangkat Daerah (PD) ialah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai rencana kegiatan selama 5 (lima) tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Terpilih Periode 2019-2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat arah kebijakan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta dilengkapi dengan matriks indikasi program yang memiliki tujuan, sasaran dan program beserta indikator dan targetnya untuk masing-masing visi.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan yang harus dijadikan rujukan agar tujuan pembangunan yang hendak dicapai dapat diukur karena merupakan salah satu faktor tolak ukur kinerja Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disusun atas landasan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2019-2023
- i. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah menjabarkan visi dan misi serta program kerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dalam sebuah dokumen perencanaan tahunan sekaligus penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan yang dilaksanakan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
2. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan Tahun 2019-2023.
3. Memudahkan seluruh jajaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

5. Terciptanya Sinkronisasi dan Sinergitas pada jajaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disajikan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang tentang gambaran umum potensi dan permasalahan bidang/lingkup yang menjadi tugas pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, selain itu dimuat landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta uraian singkat tentang sistematika penyusunan renstra ini.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan resntra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPSDMD

Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra, yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi segenap jajaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan serta sebagai referensi bagi semua pengguna dan stakeholder.

#### **LAMPIRAN**

Berisi tentang lampiran-lampiran yang dipandang perlu meliputi matriks-matriks, analisis-analisis, perhitungan-perhitungan serta peraturan perundangan yang relevan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

##### 1. Tugas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur

##### 2. Fungsi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

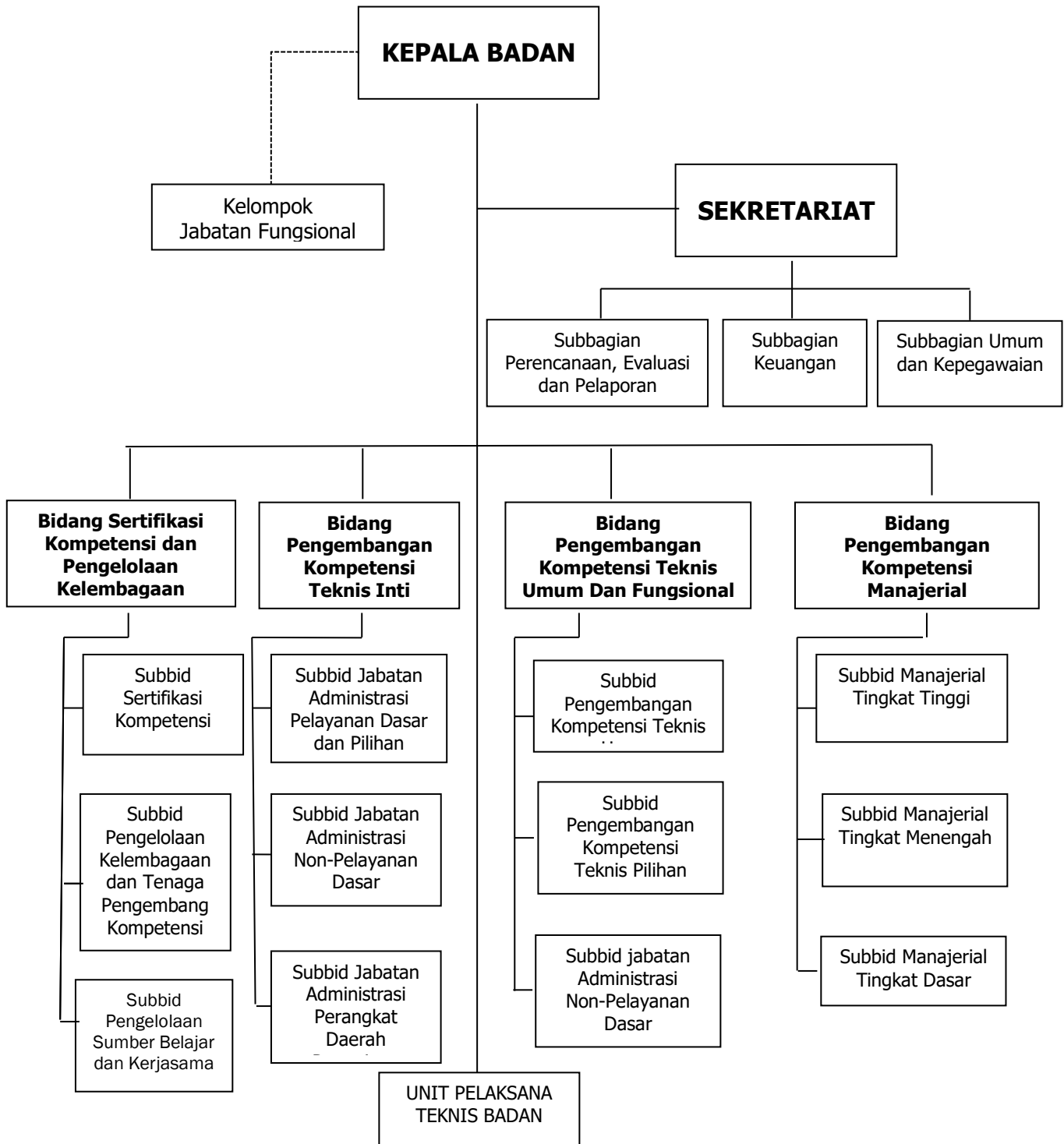
- a. penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

- d. pengkoordinasian pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- f. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. pelaksanaan administrasi BPSDMD; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

Bagan 2.1  
 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
 MANUSIA DAERAH PROV. SUMSEL



Susunan Organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III dan 15 orang pejabat eselon IV, dengan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :



## 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala Badan, Bidang dan Subbidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, pengevaluasian, pelaporan program dan penganggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkup pemerintah provinsi;
- b. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan barang milik daerah;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, kehumasan dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan fungsi tersebut, sekretariat terbagi dalam 3 sub bagian, antara lain :

- a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, yang mempunyai tugas
  - 1) menyiapkan perencanaan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
  - 2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
  - 3) melaksanakan pengolahan data dan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia;
  - 4) melaksanakan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur provinsi yang bersifat bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

- 5) mengkoordinasikan penyusunan jadwal rencana kegiatan tahunan diklat tingkat provinsi dan rencana kegiatan diklat yang akan dilaksanakan daerah kabupaten/kota;
  - 6) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas :
- 1) melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
  - 2) melaksanakan urusan rumah tangga, perkantoran, asrama, pertamanan, lingkungan dan perpustakaan;
  - 3) melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kehumasan, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
  - 4) menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengembangan Sumber Daya manusia;
  - 5) melaksanakan pengelolaan pemakaian asrama, ruang belajar, aula, laboratorium, ruang makan, perpustakaan dan fasilitas lainnya;
  - 6) pengelolaan keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan BPSDMD;
  - 7) menyiapkan perhitungan kebutuhan barang, mengadakan, mendistribusikan dan memelihara barang inventaris kantor;
  - 8) melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
  - 9) melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - 10) melaksanakan pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan pajak kendaraan bermotor;
  - 11) merencanakan penyediaan bahan referensi buku, majalah, tabloid, koran dan sumber bacaan;
  - 12) melaksanakan pengaturan, menyimpan dan memelihara bahan-bahan perpustakaan;

- 13) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas antara lain :
- 1) merencanakan urusan anggaran dan perbendaharaan keuangan;
  - 2) melaksanakan pengelolaan data perkembangan realisasi anggaran;
  - 3) menyiapkan bahan verifikasi, validasi dan akuntansi penerbitan surat perintah membayar;
  - 4) melaksanakan urusan akuntansi keuangan;
  - 5) merencanakan laporan pengelolaan anggaran;
  - 6) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
  - 7) merencanakan pembuatan daftar pembayaran gaji/insentif/tunjangan kesejahteraan pegawai;
  - 8) melaksanakan pengumpulan bahan dan pengolahan data bidang keuangan;
  - 9) melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis pengeluaran;
  - 10) melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala;
  - 11) melaksanakan penghimpunan dan pendataan aset BPSDMD;
  - 12) melaksanakan pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan aset;
  - 13) merencanakan anggaran rutin berkoordinasi dengan Subbagian Perencanaan;
  - 14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **2. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**

Berdasarkan Pasal 9 dan 10 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antara lembaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, akreditasi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar dan kerjasama;
- b. pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi;
- c. pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar;
- e. penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, dan pendidikan kepamongprajaan;
- g. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasional fungsi-fungsi tersebut, Kepala Bidang dibantu oleh :

- a. Kepala Subbidang Sertifikasi Kompetensi
- b. Kepala Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi

- c. Kepala Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama

### **3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti**

Berdasarkan Pasal 12 dan 13 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis inti.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pengembangan kompetensi teknis inti;
- b. penyusunan rencana standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
- c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
- d. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasional fungsi-fungsi tersebut, Kepala Bidang dibantu oleh :

- a. Subbidang Jabatan Administrasi Urusan Pelayanan Dasar dan Pilihan
- b. Subbidang Jabatan Administrasi Non-Pelayanan Dasar

- c. Subbidang Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang

#### **4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional**

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum, serta jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;
- b. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
- c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, pilihan, serta urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasional fungsi-fungsi tersebut, Kepala Bidang dibantu oleh :

- a. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
- b. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
- c. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

#### **5. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial**

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Kompetensi Manajerial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan Tingkat Tinggi, jabatan pimpinan Tingkat Menengah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kompetensi Manajerial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pengembangan pimpinan Tingkat Tinggi, jabatan pimpinan Tingkat Menengah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar;
- b. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan Tingkat Tinggi, jabatan pimpinan Tingkat Menengah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar;
- c. pelaksanaan seleksi/rekrutmen calon peserta diklat kompetensi jabatan manajerial;
- d. penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan Tingkat Tinggi, jabatan pimpinan Tingkat Menengah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar;
- e. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan Tingkat Tinggi, jabatan pimpinan Tingkat Menengah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar; dan

- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk operasionalisasi fungsi-fungsi tersebut, kepala Bidang Kompetensi Manajerial dibantu oleh :

- a. Subbidang Manajerial Tingkat Tinggi
- b. Subbidang Manajerial Tingkat Menengah
- c. Subbidang Manajerial Tingkat Dasar

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Data Susunan Kepegawaian

Keadaan Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2022 terdiri dari :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| a. PNS            | : 80 orang         |
| b. Tenaga Honorer | : 37 orang         |
| <b>Total</b>      | <b>: 117 orang</b> |

Dari 80 PNS dapat diuraikan sesuai masing-masing formasi sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S3	9	11 %
2	S2	39	50 %
3	S1	20	3 %
4	D3	-	-
5	SMA	12	15 %
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>

**Tabel 2.2**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	43	59 %
2	Perempuan	37	41 %
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>100</b>



**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	IV	45	45
2	III	43	43
3	II	12	12
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur**

Umur	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
21-30 tahun	3	3%
31-40 tahun	25	25%
41-50 tahun	30	30%
51-60 tahun	40	40%
>60 tahun	2	2%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Jabatan Struktural			Jabatan Fungsional
	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	
1	1	5	15	33

### 2.2.2 Aset yang Dikelola

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki berbagai sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana untuk menunjang kegiatan Kediklatan pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan seperti tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Sarana dan Prasarana BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan**

No	Sarana dan Prasarana	Gedung/Ruangan		Kapasitas Keseluruhan
		Jumlah	Fasilitas	
1	Gedung Administrasi	1 unit (2 lantai)	AC, Soundsystem, Meubelair	-
2	Gedung Widyaiswara dan Perpustakaan	1 unit (2 lantai)	AC, Soundsystem, Meubelair	
3	a. Aula Putri Kembar Dadar	1 Unit	AC, Sound System Lengkap	200 Kursi
	b. Aula Hulu Balang	1 Unit	SDA	80 kursi
4	Ruang Belajar	7 kelas	7 Ruang AC	280 orang
5	Laboratorium bahasa dan Lab. Komputer	2 kelas	AC, Sound Sistem, Proyektor	80 orang
6	Asrama/ Penginapan	71 Kamar	AC/kipas angin	211 orang
	a. Asrama Putri Rambut Selako	10 kamar	2 orang per kamar	20 orang
	b. Asrama Mayang Sari	15 kamar	5 orang per kamar	75 orang
	c. Asrama Bagus Kuning	12 Kamar	3 orang per kamar	36 orang
	d. Asrama Batuapi	11 kamar	3 orang per kamar	33 orang
	e. Asrama Dapuntahyang	12 kamar	2 orang per kamar	24 orang
	f. Asrama Tuan Junjungan	11 kamar	6 kamar kapasitas @3 orang, 5 kamar @1 orang/kamar	23 orang
7	Paviliun/Mess	1 Unit	6 Kamar AC	12 orang
8	Ruang Makan	4 Unit	Meja dan Kursi	280 Orang
9	Klinik / Balai Pengobatan	1 Unit	Type 36 2 Orang T.Medis 2 Mobil Ambulan	2 Kamar Tidur
10	Masjid	1 Unit	1 Unit	300 Orang
11	Rumah Dinas	2 Unit	2 Unit	Type 36 dan 54
12	Gedung Koperasi	1 Unit	Waserba/Kantin	20
13	Ruang Perpustakaan	1 Unit	24 Meja dan Kursi	24
14	Lap.Tenis	1 Unit	2 band	-
15	Lapangan Badminton	1 unit	1 Band	-
16	Tennis Meja	2 Unit	2 Meja	-
17	Kendaraan Dinas : Roda 2 Roda 4	7 Unit 9 Unit		Minibus 6 Unit Ambulan 2 Unit Pick Up 1 Unit

### 2.2.3 Unit Usaha

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan memiliki unit usaha berupa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang didirikan berdasarkan Badan Hukum Nomor 00313/BH/KWK.6/VI/1996 Tanggal 3 Juni 1996, dengan dokumen pendukung antara lain :

- 1) SIUP Nomor 280/kpts/SIUP-PK/2010 Tanggal 9 Februari 2010
- 2) SITU Nomor 503/IG.R/5982/KPPT/2013 Tanggal 5 September 2013
- 3) NPWP Nomor 01.780.471.7.307.000
- 4) TDP Nomor 060626500638 Tanggal 9 Februari 2010

Dengan jumlah anggota per 31 Desember 2013 sebanyak 109 orang, bidang usaha yang dijalankan yaitu :

- a. simpan-pinjam
- b. usaha lain-lain
  - 1) kerjasama usaha fotocopy
  - 2) kantin
  - 3) warung serba ada

Sumber permodalan berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dari anggota.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kiprah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2014 s.d 2018 telah melakukan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sebanyak 4.998 orang, yang meliputi pengembangan kompetensi teknis, fungsional, pemerintahan dan politik serta manajerial/kepemimpinan.

Pada Tahun 2014, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan diklat sebanyak 19 jenis diklat (22 angkatan) dengan total peserta berjumlah 810 orang, Tahun 2015 melaksanakan kegiatan diklat 17 jenis diklat (22 angkatan) dengan total jumlah peserta 884 orang dan pada Tahun 2016 melaksanakan 12 jenis diklat (18 angkatan) dengan total jumlah peserta 727 orang, Tahun 2017 melaksanakan kegiatan kediklatan dengan jumlah peserta sebanyak 1308 orang dan Tahun 2018

melaksanakan kegiatan kediklatan dengan jumlah peserta diklat 1.269 orang.

Rincian jumlah dan jenis diklat dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7  
Jumlah dan jenis diklat dalam 5 tahun terakhir

No	Jenis diklat	Jumlah Peserta Diklat (orang)					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Diklat Manajerial	427	725	636	755	2382	4925
2	Diklat Teknis Umum dan Fungsional	747	369	248	40	357	1761
3	Diklat Teknis Inti	30	126	815	40	110	1121
4	Sertifikasi dan Uji Kompetensi	104	49	265	35	442	895
	<b>JUMLAH</b>	<b>1308</b>	<b>1269</b>	<b>1964</b>	<b>890</b>	<b>3291</b>	<b>8702</b>

Tabel T-C 23

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah aparatur yang berkompeten	-	-	3360 orang	780	680	710	640	690	752	884	727	1308	1269	96,41	130,00	102,39	204,38	183,91
2	Jumlah widyaiswara yang berkompeten	-	-	40 orang	24	30	34	37	40	24	27	34	32	32	100,00	90,00	100,00	88,49	80,00

Secara keseluruhan kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil pencapaian kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ditunjukkan dengan indikator pencapaian dari target RPJMD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang terus tercapai bahkan melebihi dari target.

Dari kedua indikator kinerja pada RPJMD tersebut diatas terlihat adanya peningkatan capaian kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan kinerja ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait di Lingkungan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk sungguh-sungguh terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kediklatan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun masyarakat.

Guna meningkatkan pelayanan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2017 mulai menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 Tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari sisi pelayanan kediklatan yang diberikan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya melakukan peningkatan kualitas terhadap pelayanan diklat dari internal saja tetapi juga sudah mulai melakukan kerja sama dengan pihak lainnya seperti Ditjen Pendidikan Tinggi, Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga lainnya. Dukungan fasilitas yang lebih lengkap untuk pelayanan kediklatan jika dibandingkan dengan Badan Pengembangan SDM lainnya, termasuk pelayanan penunjang seperti laboratorium bahasa dan komputer. BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan yang cukup luas dan sarana prasarana gedung dan letak geografisnya berada ditengah

kota yang mudah dijangkau oleh kendaraan umum, sehingga menjadi pusat rujukan untuk Pengembangan SDM Daerah.

Agar pengembangan BPSDMD Provinsi Sumsel dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun prioritas pengembangan bagi bidang-bidang pelayanan yang dianggap potensial untuk meningkatkan jumlah customer yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan operasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

**Tabel TC. 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
<b>Sumber Dana APBD</b>																	
Belanja Tidak langsung	12.417.557	12.249.531	10.222.609	8.295.789	12.732.527	11.913.135	12.176.776	10.204.169	8.199.531	11.451.20	95,94	99,41	99,82	98,84	89,94		
Belanja Langsung	20.240.336	25.335.976	12.415.743	4.632.975	3.137.125	17.163.209	21.147.105	12.317.945	4.330.349	2.911.579	84,80	83,47	99,21	93,47	92,81		
<b>Jumlah APBD</b>	<b>32.657.893</b>	<b>37.585.507</b>	<b>22.638.352</b>	<b>12.928.764</b>	<b>15.869.652</b>	<b>29.076.344</b>	<b>33.323.882</b>	<b>22.522.114</b>	<b>12.529.880</b>	<b>14.362.780</b>	<b>89,03</b>	<b>88,66</b>	<b>99,49</b>	<b>96,91</b>	<b>90,50</b>		
<b>Sumber Dana BLUD</b>																	
Belanja langsung				7.851.340	12.849.982				7.247.281	12.096.107	0,00	0,00	0,00	92,31	94,13		
<b>Jumlah BLUD</b>																	
<b>TOTAL APBD + BLUD</b>	<b>32.65 x 7.893</b>	<b>37.585.507</b>	<b>22.638.352</b>	<b>20.780.104</b>	<b>28.719.634</b>	<b>29.076.344</b>	<b>33.323.882</b>	<b>22.522.114</b>	<b>19.777.161</b>	<b>26.458.887</b>	<b>89,03</b>	<b>88,66</b>	<b>99,49</b>	<b>95,17</b>	<b>92,13</b>		



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa setiap PNS berhak untuk mengembangkan kompetensinya selama 20 Jam Pelajaran per tahun. Pengembangan Kompetensi tersebut dapat dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan, seminar, kursus, penataran, praktik kerja di instansi lain serta pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta. Oleh karena itu, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai posisi dan peran yang penting dalam meningkatkan kompetensi pegawai.

BPSDMD harus mampu mewujudkan tiga kompetensi pegawai yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu teknis, manajerial dan sosial kultural. Indikator tiap kompetensi secara jelas dijabarkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kompetensi teknis, misalnya, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Terakhir, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pengembangan pemberian pelayanan dalam rangka pengembangan kompetensi antara lain :

- a. Belum adanya pengembangan sistem informasi kediklatan

Keterbatasan penggunaan teknologi sistem informasi terutama yang berbasis *web* atau *online* menjadi tantangan tersendiri bagi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mulai Tahun 2019 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan akan mengembangkan aplikasi sistem informasi kediklatan berbasis *web* yang nantinya akan terus dikembangkan untuk menjawab

tantangan pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan *e-learning*.

- b. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

Pada Tahun 2017, tepatnya tanggal 17 Maret 2017 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mulai menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang isinya berdampak secara signifikan terhadap keberadaan PPK BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam Permendagri tersebut mengharuskan Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD harus berupa Unit Kerja Dinas/Badan, sehingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus membentuk Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan PPK BLUD dimaksud.

- c. Akreditasi dan Sertifikasi Diklat

Akreditasi dan sertifikasi diklat dari instansi Pembina diklat adalah hal yang wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Fungsional, Sosiokultural dan Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan terakreditasi.

- d. BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dengan Akreditasi A, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan Akreditasi B dan Pelatihan Dasar CPNS dengan Akreditasi B. Selanjutnya BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

akan terus meningkatkan status akreditasi baik kualitas maupun kuantitas dari akreditasi, baik untuk Pelatihan Kepemimpinan maupun diklat teknis dan fungsional lainnya.

- e. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengembangan kompetensi.

Mengingat tingginya kebutuhan untuk pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mengamanatkan setiap PNS harus mengembangkan kompetensinya minimal 20 Jam Pelajaran/orang/tahun sehingga anggaran yang diperlukan tidak sedikit.

- f. Masih Adanya Ego Sektoral dalam Penyelenggaraan Diklat  
Penyelenggaraan diklat melibatkan beberapa komponen pokok yaitu adanya sarana dan prasarana, program, penyelenggara dan pengajar serta dukungan dana. Di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota masih banyak Perangkat Daerah yang belum memenuhi hal tersebut, namun tetap untuk memaksakan diri untuk melaksanakan penyelenggaraan Diklat, yang mengakibatkan mutu, tujuan dan sasaran Diklat tidak tercapai sesuai yang diharapkan.
- g. Tingginya kompetisi antar lembaga diklat  
Persaingan antar lembaga diklat cukup kompetitif dalam menyediakan sarana prasarana diklat, SDM Penyelenggara Diklat serta Penyelenggaraan
- h. Kurangnya Tenaga Pengajar Bidang Teknis Fungsional  
Terbatasnya tenaga pengajar/pengampu mata diklat pada Bidang Teknis Fungsional karena substansi materi yang sangat teknis.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan terjadi karena adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan (kondisi ideal) dengan kondisi realitas yang ada. Kondisi ideal pengembangan kompetensi ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengamanatkan bahwa Pengembangan Kompetensi adalah hak dari setiap ASN, dan setiap PNS berhak untuk Pengembangan Kompetensi setiap PNS paling sedikit 20 Jam Pelajaran/orang/tahun.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan lembaga hulu dalam pengembangan Sumber Daya Manusia harus terus berinovasi dan mengembangkan layanan pengembangan SDM guna menjawab tantangan tersebut. Salah satu usaha peningkatan pelayanan pengembangan SDM yang telah dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan beberapa Fleksibilitas yang diberikan melalui BLUD, sehingga pengembangan kompetensi ASN akan lebih cepat, efektif dan efisien.

Disamping itu, guna mewujudkan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang representatif serta SDM kediklatan baik tenaga pengelola, penyelenggara maupun widyaiswara yang kompeten.

Tabel T.C 3-5  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Perangkat Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kompetensi PNS belum optimal	Adanya kesenjangan antara kompetensi ASN yang dibutuhkan dan kompetensi yang ada	Kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi terbatas
			belum semua penyelenggaraan diklat berdasarkan analisis kebutuhan diklat
			Kurangnya motivasi ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi
2	Pengelolaan Kelembagaan belum optimal	sarana dan prasarana belum representatif	Kurangnya SDM pengelola sarana prasarana
			Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi
		SDM kediklatan belum memadai	kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi terbatas
		belum semua jenis diklat terakreditasi	kerjasama dengan instansi pembina diklat belum optimal

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga hulu dalam peningkatan kompetensi SDM aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun visi, misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu:

#### 3.2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018, memperhatikan hasil analisis isu strategis, mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur

untuk masa bhakti 2019-2023, mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, memperhatikan prioritas pembangunan nasional, merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: **SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA.**

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2019-2023 sebagai berikut:

- Keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.
- Kondisi dimana meningkatnya kualitas SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.
- Kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

### 3.2.2 Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas. Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

### 3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, maka tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Misi 1: “Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sector pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan”.**



Tujuan 1 : Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)
2. Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)
3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)
4. Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat)
5. Meningkatnya Akses Energi (Maju Akses Energi)

**Misi 2: “Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas”.**

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)
2. Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)

Tujuan 3 : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Sasaran :

Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak)

**Misi 3: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif”.**

Tujuan 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)

3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas)

**Misi 4: “Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah”.**

Tujuan 5 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)
2. Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)

**Misi 5 : “Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius”.**

Tujuan 6 : Terwujudnya Masyarakat Madani

Sasaran :

Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)

Tujuan 7 : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah melalui Seni, Budaya, dan Religi

Sasaran :

Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata)

Tujuan 8 : Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Sasaran :

Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga)

### 3.2.4 Program Kepala Daerah

Penjabaran visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
5. Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Madani
7. Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Seni dan Budaya
8. Peningkatan Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Dari penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2019-2023, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk itu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mendukung Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu Tujuan ke-4 yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan** dan sasaran ke-11 yaitu **Maju Aparatur yang Profesional dan Berintegritas** dan program prioritas daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

### 3.3 Telaahan Rencana Strategis BPSDM Kementerian Dalam Negeri

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

### 3.3.1 Visi

Visi Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri RI yaitu **“Terdepan Dalam Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah”**.

### 3.3.2 Misi

Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI yaitu :

1. Mengembangkan Program Diklat.
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Tenaga Kediklatan.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Kediklatan.
4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Diklat.
5. Melakukan Reformasi Diklat untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Diklat.
6. Memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi.
7. Melaksanakan Diklat.

### 3.3.3 Strategi

Penetapan cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Cara dimaksud dapat berupa penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta

keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Adapun strategi yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri dalam melaksanakan misinya sebagai berikut :

- Kemitraan

Dilaksanakan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi keterlibatan komponen-komponen di luar lembaga diklat dan di luar instansi pemerintah dalam pengembangan berbagai program kediklatan.

- Pengembangan Kelembagaan

Dilaksanakan agar lembaga-lembaga kediklatan mampu menjadi lembaga yang profesional dalam tataran desain organisasi, tataran sistem dan mekanisme kerjanya.

- Pengembangan Kapasitas Personil Diklat

Dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme lembaga diklat melalui upaya peningkatan profesionalisme kediklatan bagi segenap jajaran personil di lembaga diklat.

- Swadana

Dilaksanakan dengan cara pengembangan pola pendamping yang memungkinkan lembaga-lembaga diklat dan unit-unit kerja pemerintah dapat bekerja lebih dinamis dan kreatif. Untuk itu strategi pembiayaan program diklat dengan pola swadana semakin penting untuk dikembangkan.

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan BPSDMD Prov. Sumsel berdasarkan**  
**Tujuan Renstra BPSDMD Kemendagri RI beserta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Tujuan Renstra Badan Pengembangan SDM Kemendagri RI	Permasalahan Pelayanan Badan Pengembangan SDM Daerah Prov. Sumsel	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga lainnya di dalam dan luar negeri untuk kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat.	Lemahnya koordinasi penyelenggaraan Diklat	Masih adanya ego sektoral dalam penyelenggaraan diklat di masing-masing OPD Provinsi	a. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tupoksi BPSDMD Prov. Sumsel b. Adanya kebijakan diklat satu pintu (SE Gub. Sumsel Nomor 012/0330/SE/Bandiklat/2015)
2	Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kualifikasi pejabat fungsional widyaiswara/tenaga pengajar dan tenaga fungsional lainnya untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas.	Kurangnya tenaga pengajar (Widyaiswara) di bidang teknis dan fungsional	kurangnya pelatihan widyaiswara di bidang teknis dan fungsional	Kerjasama (MoU) dengan pihak/lembaga teknis terkait
3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat untuk mendukung kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.	Kualitas sarana dan standar penyelenggaraan diklat belum memadai	penganggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana kediklatan sesuai standar masih terbatas	lahan BPSDMD cukup luas (41.125 m2)
		Kurangnya sistem Teknologi informasi (IT) dan media pembelajaran	Kurangnya sosialisasi penggunaan Teknologi informasi (IT)	Sudah adanya jaringan Teknologi informasi (IT)

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Letak BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan terletak di posisi strategis yang sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penempatan Kantor dan Asrama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah berdasarkan pada kondisi dan

suasana yang dibutuhkan dalam terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan berada jauh dari kebisingan dan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga peserta diklat dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan baik.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pengembangan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tentunya dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan yang akan berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh. Berbagai masalah dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan BPSDMD tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana peningkatan kompetensi ASN merupakan hak dari setiap ASN dan dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditegaskan bahwa setiap PNS berhak untuk pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran/orang/tahun sehingga hal tersebut merupakan amanah yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan dengan baik oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2018 berjumlah 15.346 Pegawai akan melaksanakan kegiatan diklat maka akan ada 175 angkatan diklat per tahun (1 angkatan 40 orang peserta), ditambah lagi Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka potensi pengguna jasa layanan di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan akan semakin besar.

2. Pengelolaan kelembagaan belum optimal (peningkatan sarana dan prasarana)

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan kediklatan yang terstandar maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan terstandar, sehingga dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana tersebut akan menambah kapasitas pelayanan baik kediklatan maupun non kediklatan (pemanfaatan aset) di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, disamping itu peningkatan kualitas penyelenggaraan melalui akreditasi perlu ditingkatkan, karena belum semua jenis diklat terakreditasi.

3. Kurangnya Penerapan Sistem Teknologi Informasi (IT)

Sistem Teknologi Informasi (IT) belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Diklat karena belum tersedianya sistem/program khusus untuk sistem manajemen informasi kediklatan sehingga data kediklatan masih dalam bentuk manual. Penerapan Sistem informasi kediklatan di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan harus menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan BPSDMD sehingga akan memberikan kemudahan, kecepatan dan meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

4. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM Widyaiswara (Pelatihan/TOT WI)

Dalam rangka peningkatan kualitas/kapasitas SDM Aparatur, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan berbagai jenis diklat yang dikategorikan kedalam diklat kepemimpinan, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan. Untuk diklat kepemimpinan dan pemerintahan dapat dipenuhi oleh Widyaiswara yang ada, sedangkan Diklat Teknis dan Fungsional masih dirasakan kekurangan tenaga pengajar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, diantaranya dengan mengadakan diklat calon widyaiswara dan melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga serta perguruan tinggi untuk memberikan



pelayanan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Optimalisasi monitoring terhadap alumni Diklat

Sejauh ini pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemberdayaan alumni pasca diklat setelah dikembalikan ke Perangkat Daerah masing-masing Kabupaten/Kota belum dilaksanakan secara optimal.

6. Berbagai rencana pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang telah disusun tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak di dukung dengan ketersediaan anggaran yang mencukupi. Pada saat ini BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi kendala dengan kurangnya anggaran untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan, baik untuk pengembangan maupun untuk operasional.

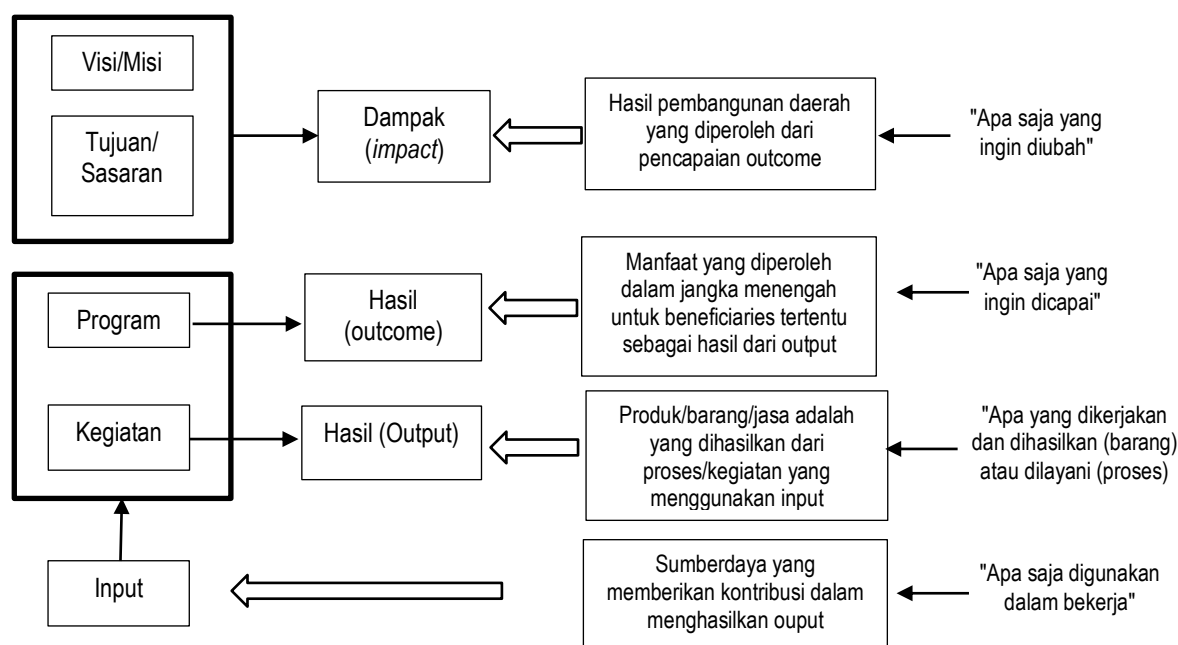
## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

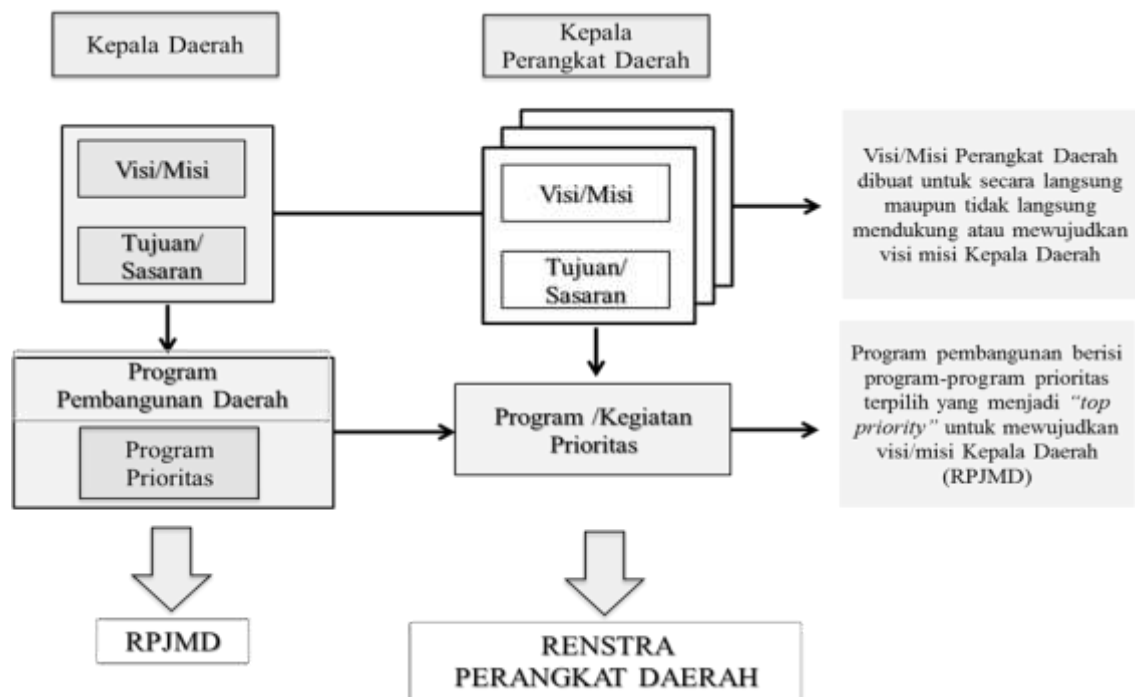
Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1  
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 4.2  
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



#### 4.1 Tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan tujuan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih.

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk itu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan harus dapat mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu Tujuan ke-4 yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan** dan sasaran ke-11 yaitu **Maju Aparatur yang Profesional dan Berintegritas** (melalui meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah).

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, BPSDMD Provinsi

Sumatera Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar.

Untuk mewujudkan Tujuan Sumber Daya Aparatur yang kompeten tersebut, dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran yaitu Meningkatnya Kompetensi Manajerial Aparatur, dan Meningkatnya Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio-Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN.

Dalam upaya mencapai Sasaran untuk meningkatkan kompetensi manajerial bagi ASN, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakannya melalui pendidikan dan pelatihan manajerial/struktural bagi pejabat ASN baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam upaya mencapai sasaran untuk Meningkatkan Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN dilaksanakan melalui upaya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan. Ketiga kompetensi tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam jabatan-jabatan tertentu, sehingga upaya pengembangannya dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Aparatur yang Profesional dan Berintegritas sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Terpilih.

Tujuan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan kedua yaitu mewujudkan pengelolaan kelembagaan diklat yang sesuai dengan standar. Untuk mewujudkan Tujuan yang kedua ini akan dilaksanakan melalui Sasaran-Sasaran berikut yaitu meningkatkan kualitas tenaga kediklatan, meningkatkan jumlah diklat yang terakreditasi serta meningkatkan sarana dan prasarana kediklatan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.

Agar Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dicapai maka tentu diperlukan penentuan target per tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. Penentuan target ditetapkan dengan

mempertimbangkan persentase dalam skala 0-100%. Angka tersebut antara lain didapat dengan persentase jumlah Jabatan yang ada dan dikurangi dengan alumni Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat dalam jabatan tersebut. Tabel berikut menggambarkan Tujuan dan Sasaran beserta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel T-C 25

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial / struktural	80%	85%	87%	88%	90%
		Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan	35%	45%	55%	65%	75%
2	Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan Sarana dan Prasarana kediklatan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan	75%	80%	85%	90%	95%
		Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan	Persentase tenaga kediklatan diklat yang bersertifikat (pengelola,	65%	70%	75%	80%	85%

		penyelenggara dan widyaiswara)					
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat	Persentase Diklat yang mempunyai Nilai Evaluasi Memuaskan	85%	87%	90%	93%	95%
		Indeks kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran atau rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Cara dimaksud dapat berupa penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi BPSDMD dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Aparatur Provinsi Sumatera Selatan. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan integritas dan perbaikan layanan aparatur.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi III RPJMD**  
**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023**

<b>Visi :</b> Sumsel Maju untuk Semua
<b>Misi III :</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
<b>Tujuan RPJMD :</b> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
<b>Sasaran RPJMD</b>



Meningkatnya Profesionalisme Integritas Aparatur Pemerintah Daerah ( <i>Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas</i> )	
<p><b>Strategi RPJMD :</b> Meningkatkan integritas ASN.</p>	<p><b>Arah Kebijakan RPJMD :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah di Semua Bidang.</li> <li>2. Mengoptimalkan Pengawasan Melekat.</li> <li>3. Mendorong Masyarakat Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Kinerja</li> <li>4. Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>).</li> <li>5. Meningkatkan Tunjangan ASN Berbasis Kinerja.</li> </ol>

Dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 di atas dan dalam mencapai tujuan dan sasaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, dirumuskan strategi Renstra BPSDMD Tahun 2019-2023, sebagai berikut :

1. Merencanakan program peningkatan kompetensi baik kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiokultural maupun kompetensi pemerintahan.
2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN
3. Melaksanakan evaluasi pasca diklat
4. Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kualitas tenaga kediklatan
5. Memelihara dan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan

### **Arah Kebijakan**

Dalam rangka pelaksanaan strategi untuk dapat mencapai sasaran dengan lebih baik, maka perlu dirumuskan strategi yang tepat dan komprehensif, sebagai landasan dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi ASN
2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN
3. Melaksanakan dan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi diklat baik untuk penyelenggara maupun tenaga pengajar
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat
5. Penguatan SOP pengelolaan Sarana dan Prasarana diklat
6. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas tenaga kediklatan seperti *Training Officer Course, Management Of Training, Training Of Facilitator, Training Of Trainer, Workshop dan Focus Group Discussion.*
7. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan akreditasi diklat
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat
9. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan diklat
10. Mengoptimalkan penggunaan metode, teknis dan strategi pembelajaran yang baik

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPSDMD Prov. Sumsel**

VISI : Sumsel Maju Untuk Semua			
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1. Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan program peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan</li> <li>2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN</li> <li>3. Evaluasi pasca diklat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi manajerial</li> <li>2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN</li> <li>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> </ol>
	4. Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan ASN</li> <li>2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN</li> <li>3. Evaluasi pasca diklat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, sosiokultural dan kompetensi pemerintahan</li> <li>2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN</li> <li>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> </ol>

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana kediklatan	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kediklatan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat 2. Penguatan SOP pengelolaan Sarana dan Prasarana diklat
	2. Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan	Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kualitas tenaga kediklatan	Melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas tenaga kediklatan seperti Training Officer Course, Management Of Training, Training Of Facilitator, Training Of Trainer, Workshop dan Focus Group Discussion
	3. Meningkatkan jumlah diklat yang terakreditasi	Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas akreditasi jenis diklat	1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat
	4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat	Terlaksananya kegiatan kediklatan yang berkualitas	6. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan diklat 7. Mengoptimalkan penggunaan metode, teknis dan strategi pembelajaran yang baik 8. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi diklat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program yang ditetapkan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumsel sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategik. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan kegiatan-kegiatan prioritas pada tahun yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan strategis. Adapun kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2019-2023 sebagai berikut :

#### **6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019-2020**

Program dan Kegiatan OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 8 (Delapan) Program dengan 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

##### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Internet
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman

- 12) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
- 13) Penyediaan Jasa Tutor SKJ
- 14) Pengadaan Jasa Keamanan Kantor
- 15) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga
- 3) Pembangunan Gedung Kantor
- 4) Pengadaan Kendaraan Dinas
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 1) Pengadaan pakaian dinas

**d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 1) Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)
- 2) Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)
- 3) Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)
- 4) Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)
- 5) Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah ( Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)

**e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1) Penjamin Mutu Diklat
- 2) Rapat Teknis OPD
- 3) Penyusunan Rencana Strategis OPD
- 4) Penyusunan LKJIP Perangkat Daerah

**f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur /PNS/Anggota KORPRI (Hanya Tahun 2019)**

- 1) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
- 2) Uji Kompetensi dan Sertifikasi
- 3) Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan
- 4) Sosialisasi Pelaksanaan Orientasi DPRD Kab/Kota se-Sumsel
- 5) Workshop Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
- 6) Diklat Peningkatan Kapasitas Desa
- 7) Diklat Training Officer Course (TOC)
- 8) Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara
- 9) Diklat Training Multi Media Presentation
- 10) Diklat Bendahara Sekolah
- 11) Diklat Peningkatan Kompetensi Bidan
- 12) Diklat Bendahara Keuangan Daerah
- 13) Diklat Protokol

**g. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur**

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan
- 2) Analisis Kebutuhan Diklat
- 3) Penyelenggaraan Akreditasi Diklat
- 4) Diklat Kepemimpinan Tngkat II / Pelatihan Kepemimpinan Nasional II
- 5) Diklat Kepemimpinan Tngkat III / Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- 6) Diklat Kepemimpinan Tngkat IV / Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
- 7) Diklat Dasar CPNS
- 8) Sosialisasi Pelaksanaan Orientasi DPRD Kab/Kota se Sumsel
- 9) Workshop Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
- 10) Diklat Peningkatan Kapasitas Desa
- 11) Diklat Teknis Administrasi Dasar bagi PNS
- 12) Diklat Pelayanan Publik
- 13) Diklat Manajemen Kearsipan
- 14) Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Non Pelayanan
- 15) Diklat Dasar Pol PP Pola 150 JP

- 16) Diklat Penataan Batas Wilayah dan Penanganan Komplik  
Pertahanan
- 17) Diklat Peningkatan Pelayanan Publik
- 18) Teknis Tata Naskah Dinas
- 19) Diklat Penyusunan APBD
- 20) Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
- 21) Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Pelayanan  
Dasar dan Pilihan
- 22) Diklat Pengembangan Kepribadian Aparatur
- 23) Diklat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- 24) Diklat Pengelolaan Perpajakan
- 25) Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Perangkat  
Daerah Penunjang
- 26) Penyelenggaraan Akreditasi Diklat
- 27) Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara
- 28) Diklat Training Multi Media Presentation
- 29) Diklat Persiapan Pensiun
- 30) Diklat Tata Cara dan Teknis Penilaian Aset
- 31) Diklat Management of Training (MOT)
- 32) Diklat Revolusi Mental
- 33) Diklat Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai  
Negeri Sipil
- 34) Diklat Manajemen Penilaian Kerja Individu/PNS
- 35) Diklat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 36) Uji Kompetensi dan Sertifikasi
- 37) Uji Kompetensi dan diklat P2UPD
- 38) Diklat penguatan jafung polisi pamong praja
- 39) Diklat Perhitungan Angka Kredit Pol PP
- 40) Pembekalan dan Uji Kompetensi Pol PP
- 41) Diklat pemadam kebakaran
- 42) Pembekalan dan Uji Kompetensi Camat
- 43) Diklat Bendahara Sekolah
- 44) Diklat Bendahara Keuangan Daerah
- 45) Diklat Peningkatan Kompetensi Bidan
- 46) Diklat Protokol



- 47) Diklat Pelayanan Publik bagi ASN
- 48) Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah (OL)
- 49) Diklat Pariwisata (OL)
- 50) Diklat Manajemen Kepegawaian
- 51) Diklat Manajemen Kepala Sekolah
- 52) Diklat Manajemen Kebakaran
- 53) Diklat Fungsional Profesionalitas Guru
- 54) Diklat Fungsional Tenaga Pranata Komputer
- 55) Diklat Fungsional Pranata Laboratorium
- 56) Diklat Fungsional Pertanian
- 57) Diklat Fungsional Tenaga Perawat Kesehatan

#### **h. Pendidikan Kedinasan**

- 1) Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Aparatur
- 2) Orasi Ilmiah

#### **i. Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah/BLUD**

- Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

### **6.2 PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021-2022**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, Nomenklatur program dan kegiatan harus mengikuti peraturan tersebut, untuk itu program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - h) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - e) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- i) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c) Pengadaan Mebel
  - d) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - f) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
  - f) Urusan Pemerintahan Daerah
  - g) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - h) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - i) Pemeliharaan Mebel
  - j) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - k) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - l) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - m) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - n) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 7. Peningkatan Pelayanan BLUD

- a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

### **b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

#### 1. Pengembangan Kompetensi Teknis

- a) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- b) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- c) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- d) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

#### 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
- b) Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
- c) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- d) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
- e) Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
- f) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
- g) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- h) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Adapun rincian pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2019-2020 pada Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat		<b>Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.519.287.000</b>	<b>2.364.744.370,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.635.605000</b>	2.294.614.516		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko yang dibutuhkan dalam 1 tahun	100%	2150 Materai dan perangko	2150 Materai dan perangko	10.000.000	9.999.000,00	2150 Materai dan perangko	2150 Materai dan perangko	10.000.000	9.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Internet	Jumlah rekening telepon, air dan listrik, internet	100%	48 Rekening	48 Rekening	1.000.930.000	882.149.871,00	48 Rekening	48 Rekening	989.715.000	745.078.262		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	100%	16 Kendaraan	16 Kendaraan	20.000.000	11.065.450,00	16 Kendaraan	16 Kendaraan	20.000.000	4.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			nal												
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayar	100%	12 Bulan	12 Bulan	34.200.000	32.900.000,00	12 Bulan	12 Bulan	31.800.000	31.800.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor	100%	12 Bulan	12 Bulan	580.400.000	580.370.600,00	12 Bulan	12 Bulan	580.400.000	575.973.000		
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara	100%	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	69.400.000,00	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	50.000.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100%	30 jenis	30 jenis	65.000.000	65.000.000,00	30 jenis	30 jenis	49.000.000	49.000.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	100%	10 Jenis/Item	10 Jenis/Item	64.000.000	63.900.000,00	10 Jenis/Item	10 Jenis/Item	45.000.000	44.800.000		
			Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100%	25 Jenis	25 Jenis	50.000.000	49.993.450,00	25 Jenis	25 Jenis	50.000.000	49.993.450		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan per UU yang	100%	7 Jenis	7 Jenis	10.000.000	9.964.000,00	7 Jenis	7 Jenis	10.000.000	9.968.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			undangan	tersedia											
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	100%	12 Bulan	12 Bulan	45.744.000	45.700.000,00	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	29.900.000		
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah gaji pegawai non pns	100%	39 OB	39 OB	112.020.000	99.150.000,00	39 OB	39 OB	246.090.000	190.260.000		
			Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah honor instruktur SKJ	100%	47 Kali	47 Kali	14.100.000	14.100.000,00	47 Kali	47 Kali	3.600.000	3.600.000		
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor	-	-	-	54.000.000	53.625.000,00	60 OB	60 OB	215.000	214.500.000		
			Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah dokumen laporan perjalanan dinas yang tersusun	100%	110 Kali	110 Kali	383.893.000	377.426.999,00	120 Kali	120 Kali	305.000.000	285.641.804		
Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan Sarana dan Prasarana kediklatan		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik</b>	100%	100%	100%	585.000.000	564.315.000	100%	100%	3.199.200.000	2.600.363.430		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	-	1 Jenis	1 Jenis	30.000.000	29.982.000	5 jenis	5 jenis				
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga/ asrama	-	-	-	-	-	10 jenis	10 jenis	100.000.000	99.401.500		
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	-	-	-	1 gedung	1 gedung	1.242.600.000	1.202.512.000		
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	1.056.600.000	532.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	100%	10 Gedung	10 Gedung	40.000.000	39.982.000	10 Gedung	10 Gedung	370.000.000	369.149.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	100%	16 Kendaraan	16 Kendaraan	165.000.000	146.900.000	16 Kendaraan	16 Kendaraan	225.000.000	202.976.930		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	100%	12 Bulan	12 Bulan	140.000.000	139.814.000	12 Bulan	12 Bulan	105.000.000	94.920.000		
			Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	-	1 Gedung /	1 Gedung /	210.000.000	207.719.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Unit/Paket	Unit/Paket								
Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>	0%					100%	100%	184.000			
			Pengadaan pakaian dinas	Jumlah jenis pakaian dinas yang tersedia	-	-	-			4 jenis (PDH, PSH, batik, olahraga)	4 jenis (PDH, PSH, batik, olahraga)	184.000			
Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas aparatur</b>	0%	100%	100%	120.900.000	113.374.481	100%	100%	37.224.000	36.494.063		
			Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking perencanaan pembangunan	0%	3 Orang	3 Orang	30.750.000	30.186.237	-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building bidang perencanaan	0%	3 Orang	3 Orang	40.700.000	38.639.900	-	-	-	-		
			Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Aparatur yang mengikuti SAKIP Perangkat Daerah	0%					3 Orang	3 Orang	15.625.000	15.624.515		
			Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan SAKIP perangkat daerah	0%	3 Orang	3 Orang	25.750.000	22.623.980			21.599.000	20.896.548		
			Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	0%	3 Orang	3 Orang	23.700.000	21.924.364	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat		<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat / berkembang</b>				200.000.000	184.872.567	-	-	<b>165.160.000</b>	115.429.989		
			Penjaminan Mutu Diklat	Jumlah dokumen program /kegiatan	100%	100%	100%	110.000.000	101.780.000	100%	100%	85.550.000	54.350.000		
			Rapat Teknis OPD	Jumlah dokumen program /kegiatan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	39.193.079	2 Dokumen	2 Dokumen	29.610.000	29.610.000		
			Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah Dokumen renstra OPD	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	43.899.488	1 Dokumen	1 Dokumen	-			
			Penyusunan LKJIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	50.000.000	31.469.989		
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/ Anggota KORPRI</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas aparatur</b>	-	-	-	2.468.518.000	2.272.299.017	1 Dok	1 Dok	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV	100%	100%	100%	600.000.000	581.274.983	-	-	-	-		
			Uji Kompetensi dan Sertifikasi	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi dan sert	100%	40 orang	40 orang	166.725.000	155.256.125	-	-	-	-		
			Pengembangan system informasi kediklatan	Jumlah system informasi kediklatan	100%	1 sistem	1 sistem	150.000.000	147.875.672	-	-	-	-		
			Sosialisasi Pelaksanaan Orientasi DPRD Kab/Kota se Sumsel	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Orientasi DPRD	100%	50 orang	50 orang	91.550.000	85.539.359	-	-	-	-		
			Workshop Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek pengembangan kepribadian aparatur	100%	60 orang	60 orang	97.800.000	90.578.609	-	-	-	-		
			Diklat peningkatan kapasitas desa	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	100%	30 orang	30 orang	325.150.000	323.542.918	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				peningkatan kapasitas desa											
			Diklat Training Officer Course (TOC)	jumlah ASN yang mengikuti Diklat TOC	100%	30 orang	30 orang	195.775.000	138.192.268	-	-	-	-		
			Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara	jumlah ASN yang mengikuti diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara	100%	40 orang	40 orang	96.000.000	87.542.189	-	-	-	-		
			Diklat Training Multi Media Presentation	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Training Multi Media Presentation	100%	30 orang	30 orang	63.268.000	63.268.000	-	-	-	-		
			Diklat Bendahara sekolah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Bendahara	100%	40 orang	40 orang	147.250.000	144.259.800	-	-	-	-		
			Diklat peningkatan kompetensi bidan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bidan	100%	40 orang	40 orang	170.000.000	137.644.560	-	-	-	-		
			Diklat bendahara keuangan daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bendahara keuangan	100%	40 orang	40 orang	200.000.000	170.610.040	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				daerah											
			Diklat Protokol	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat protokol	100%	40 orang	40 orang	165.000.000	146.714.494			-			
Mewujudkan Pengeolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat		<b>Program Pengembangan Kompetensi Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	-	-	-	-	-	100%	100%	503.173.500	481.073.487		
			Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan	Tersedianya data base sistem Informasi Kediklatan	-	-	-	-	-	1 aplikasi/sistem	1 aplikasi/sistem	72.695.000	72.574.000		
			<b>BIDANG MANAJERIAL</b>					-	-			-	-		
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan		<b>BIDANG TEKNIS INTI</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	n ASN														
			Diklat Pengembangan Kepribadian Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kepribadian Aparatur	-	-	-	-	-	40 orang	40 orang	14.711.000	14.710.900		
			Diklat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	40 orang	40 orang	120.000.000	99.283.803		
			<b>BIDANG SERTIFIKASI</b>												
			Penyelenggaraan Akreditasi Diklat	Jumlah dokumen akreditasi	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	144.882.500	144.789.932		
			<b>BIDANG TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL</b>												
			Diklat Bendahara Sekolah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Bendahara Sekolah	-	-	-	-	-	40 orang	40 orang	140.000.000	138.830.262		
			Diklat Pelayanan Publik bagi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pelayanan Publik bagi ASN	-	-	-	-	-	30 orang	30 orang	10.885.000	10.884.590		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan		<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Persentase peningkatan ketgerampilan dan profesional aparatur</b>	100%	100%	100%	250.000.000	213.046.366	100%	100%				
			Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur	3 orang	4 orang	4 orang	50.000.000	20.137.700	2 orang	2 orang				
			Orasi Ilmiah	Terlaksananya orasi ilmiah widyaiswara	100%	4 orang	4 orang	200.000.000	192.908.666	1 orang	1 orang	9.800.000	9.771.700		
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN		<b>Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</b>	<b>Persentase peningkatan kompetensi aparatur melalui PPK BLUD</b>	100%	100%	100%	16.113.651.969	13969.763.333	100%	100%	10.714.578.499	9.717.483.878		
			Pelayanan Pengembangan SDM Daerah	Terlaksananya peningkatan kompetensi	100%	100%	100%	16.113.651.969	13.969.763.333	100%	100%	10.714.578.499	9.717.483.878		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019				Tahun 2020					
						Kinerja		Anggaran (Rp)		Kinerja		Anggaran (Rp)			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				melalui mekanisme BLUD											
<b>Total Anggaran</b>								<b>22.257.356.969</b>	<b>19.682.415.134</b>			<b>17.264.740.999</b>	<b>15.255.231.063</b>		

### 6.3 PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021-2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, Nomenklatur program dan kegiatan harus mengikuti peraturan tersebut, untuk itu program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - i) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - j) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - k) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - l) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - m) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - n) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - o) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - p) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - d) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - e) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - f) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - f) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - g) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - h) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - i) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- j) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- j) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - k) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - l) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - m) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - n) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - o) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - p) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - q) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - r) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - i) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - j) Pengadaan Mebel
  - k) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - l) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - m) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - n) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- o) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - p) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - q) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - r) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - s) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
  - t) Urusan Pemerintahan Daerah

- u) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - v) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - w) Pemeliharaan Mebel
  - x) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - y) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - z) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - aa) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - bb) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Peningkatan Pelayanan BLUD
- b) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

**d. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**3. Pengembangan Kompetensi Teknis**

- e) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- f) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- g) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- h) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis

umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

4. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  - i) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
  - j) Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
  - k) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - l) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
  - m) Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
  - n) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
  - o) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
  - p) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Adapun rincian pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2021-2023 pada Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 6.2 dibawah ini.

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah</b>		100%		100%		100%		100%			
			<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	60.000.000		110.000.000		
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA SKPD						1 dokumen	50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 dokumen	50.000.000		50.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 dokumen	50.000.000		50.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 dokumen	50.000.000		50.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000		150.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur)						1 laporan	120.000.000		120.000.000		
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi keuangan</b>											
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		90 orang	12.116.376.000	80 orang	13.248.341.000	90 orang	14.500.000.000		39.864.717.000		
			Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil		32 orang	881.010.0						2.799.030.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			00	49 orang	959.010.000	49 orang	959.010.000				
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12 dokumen	52.140.000	12 dokumen	375.600.000	12 dokumen	375.600.000	36 dokumen	803.340.000		
Pengelolaan Kelemagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD</b>				100 %	100.000.000	100 %	100.000.000		200.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan											
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 orang	50.000.000	3 orang	100.000.000	3 orang	100.000.000		250.000.000		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi umum PD</b>											
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi		1 paket	50.000.000	1 paket	115.000.000	1 paket	115.000.000		280.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	65.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000		225.000.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	65.000.000	1 paket	64.000.000	1 paket	64.000.000		194.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000		30.000.000		
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 laporan	40.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000		140.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggara		120 kali	285.000.000	120 kali	390.000.000	120 kali	390.000.000		1.065.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			dan Konsultasi SKPD	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	120.000.000		360.000.000		
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</b>				100%	900.000.000						
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan						5 unit mobil dan 4	1.800.000.000		1.800.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						motor					
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan											
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan											
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan											
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan											
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 gedung	1.467.000.000	1 gedung	900.000.000	1 gedung	2.000.000.000		4.367.000.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>				100%	1.734.600.000						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	10.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000		40.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 laporan	889.715.000	48 laporan	1.119.600.000	48 laporan	1.119.600.000		3.128.915.000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	600.000.000	1 laporan	600.000.000	1 laporan	600.000.000		1.800.000.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan BMD				100%	600.000.000	100%	600.000.000		1.200.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		16 kendaraan	185.000.000	16 kendaraan	185.000.000	16 kendaraan	185.000.000		555.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan											



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Lapangan	Pajak dan Perizinannya											
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara											
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000		225.000.000		
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara											
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		10 gedung	200.000.000	10 gedung	200.000.000	10 gedung	200.000.000		600.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 bulan	140.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	140.000.000		320.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Dipelihara/Direhabilitasi											
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase terlaksananya program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>				100%	4.120.000.000						
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>				100%	870.000.000						
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan		1 dokumen	110.000.000			1 dokumen	150.000.000		260.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun											
			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Pemerintahan Umum yang Disusun											
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi		200 orang	575.000.000	110 orang	750.000.000	240 orang	1.800.000.000		3.125.000.000		
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan				2 dokumen	120.000.000				120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum											
			<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</b>				100%	3.250.000.000						
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar,		1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000		375.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun											
			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/ Kota yang Terkelola dengan Baik		1 lembaga	152.287.000	1 lembaga	200.000.000	1 lembaga	200.000.000		552.287.000		
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi						40 orang	300.000.000		300.000.000		
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga		2 laporan	235.000.000	1 laporan	150.000.000	2 laporan	300.000.000		685.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Kompetensi, dan Sumber Belajar	Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar											
			Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga											
			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri bagi pimpinan daerah, JPT dan jafung (penyusunan modul)						1 dokumen	150.000.000		150.000.000		
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan		5 laporan	1.371.892.000	5 laporan	2.750.000.000	9 laporan	4.280.000.000		8.401.892.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama											
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang	Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			100%	21.814.285.644	100%	9.500.000.000	100%	20.000.000.000		51.314.285.644		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
kompeten	sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN														
			Peningkatan Pelayanan BLUD				21.814.285.644		9.500.000.000		16.500.000.000		47.814.285.644		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 unit	21.814.285.644	1 unit	9.500.000.000	1 unit	16.500.000.000	1 unit	47.814.285.644		
<b>Total Anggaran</b>						100%	<b>41.684.705.644</b>	100%	<b>32.461.551.000</b>	100%	<b>47.003.210.000</b>		<b>121.149.466.644</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD telah ditetapkan indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula		Menjadi
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	75%	80%	80,45%	85%	83,6	90%	87%	92%	88%	95%	90%	90%	
2	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan	30%	35%	42,61%	45%	48,18	55%	55%	65%	65%	75%	75%	75%	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Pokok-pokok pikiran yang ada dalam penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 berisikan rangkaian program dan kegiatan guna diimplementasikan oleh seluruh anggota organisasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada, yaitu faktor internal dan eksternal serta kondisi lingkungan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai tolak ukur dan sekaligus penuntun bagi segenap organisasi, maka kita perlu secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan kediklatan dengan posisi serta peran yang diemban masing-masing.

Hal diatas menyadarkan kita bahwa Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan benar-benar didasarkan atas analisis yang akurat dengan melihat potensi yang ada sehingga wajar bila Renstra mengakomodir semua kepentingan organisasi yang ditetapkan secara bersama dan harus dipatuhi secara bersama-sama pula.

Demikian kiranya Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini dapat dipedomani dan bermanfaat bagi kita bersama.